

Pengaruh Rezim Ekonomi Politik Terhadap Keamanan Ekonomi Pasca Perang Sipil di Nepal

Hidayat Chusnul Chotimah¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta,
hidayat.chotimah@staff.uty.ac.id atau hidayat.chusnul@gmail.com

ABSTRAK

Perang sipil atau yang disebut sebagai *People's War* selama sepuluh tahun di Nepal (1996-2006) telah mengakibatkan *human insecurity* khususnya terkait ancaman keamanan ekonomi dan keamanan individu (*person*) bagi masyarakat di Nepal. Keberadaan rezim ekonomi politik yang dibawa pasca berakhirnya perang sipil di Nepal telah menimbulkan adanya kekerasan struktural yang dialami oleh masyarakat seperti perampasan hak politik, ekonomi maupun sosial. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh sindikat rezim politik dan ekonomi yang dibawa setelah perang sipil di Nepal terhadap keamanan manusia khususnya pada aspek keamanan ekonomi dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka yang dikumpulkan dari artikel jurnal maupun laporan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan rezim ekonomi politik di Nepal telah membawa Nepal sebagai salah satu negara termiskin di dunia dalam dimensi kemiskinan moneter dan non-moneter. Dari segi kemiskinan moneter, ada perbedaan pendapatan yang lebar yang dirasakan oleh penduduk di Nepal. Sedangkan dari segi kemiskinan non-moneter dapat dilihat dari kondisi kerawanan pangan yang membawa implikasi terhadap memburuknya kondisi kesehatan dan gizi akibat dari akses yang buruk terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Kata Kunci: Rezim ekonomi politik, Perang Sipil, Keamanan Manusia, Keamanan Ekonomi, Nepal

ABSTRACT

The ten years People's war or civil war in Nepal during 1996-2006, has resulted in human insecurity particularly the threat of economic security and personal security. The existence of political and economic regime brought after the end of civil war in Nepal has led to structural violence for communities such as the deprivation of political, economic and social rights. This paper will explain how the influence of political and economic regime syndicate brought after Nepal's civil war to human security, particularly on economic security dimensions and how the efforts of government to overcome it. The study uses qualitative research method through literature study that collected from journal articles and previous research reports. The results show that the existence of political and economic regime in Nepal has brought Nepal as one of the world's poorest countries in the dimensions of monetary and non-monetary poverty. In terms of monetary poverty, there are wide income differences experienced by the population in Nepal. While in terms of non-monetary poverty can be seen from the condition of food insecurity which has implications for deteriorating health and nutrition conditions due to poor access to basic services and social protection.

Keywords: Political economic regimes, People's war, Human Security, Economic Security, Nepal

Pendahuluan

Nepal merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi di mana ada 103 kasta dan etnis kelompok serta 92 bahasa.¹ Ketika Nepal memutuskan untuk menganut sistem demokrasi multipartai dari tahun 1990-an yang disertai dengan penerapan ekonomi liberal, sistem ini ternyata dianggap tidak bisa mengatasi eksklusi dan kerentanan sosial yang ada. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya produktif termasuk tanah, modal dan teknologi (yang diukur dengan tingkat kemiskinan atau koefisien Gini dari pendapatan atau aset sumber daya produktif). Proses pembangunan di Nepal sendiri telah mengabaikan sektor pertanian. Sementara itu, kemiskinan di pedesaan diperburuk oleh tingginya tingkat kepemilikan tanah akibat upaya untuk melakukan reformasi tanah di tahun 1950-an dan 1960-an yang telah gagal.²

Selain itu, patronase elit negara di Nepal terbentuk berdasarkan permasalahan kepemilikan tanah oleh penguasa atau disebut sebagai “*state landlordism*” dengan memberikan imbalan terhadap pegawai negeri, bangsawan dan pendeta atas kesetiaan politik serta layanan kepada negara. Sistem ini kemudian menciptakan kelas elit tanah sebagai kasta tinggi dan kelas petani sebagai kasta bawah. Pola elit anggota kasta tinggi masyarakat menunjukkan keengganan untuk bekerja, tetap puas dengan tidak melakukan apa pun selain mengumpulkan uang sewa dan dipuji secara sosial, bahkan mereka mendapat perlindungan dari paternalisme ekonomi

negara yang melindungi kelompok etnis tertentu dan kasta tinggi di Nepal.³

Perpaduan antara unsur politik dan ekonomi inilah yang menjadi dasar permulaan atas kekecewaan sipil dan konflik bersenjata yang telah menelan korban jiwa dan sumber daya selama satu dekade di Nepal.⁴ Langkah reformasi yang lambat dan dangkal pada paruh pertama tahun 1990-an menjadi alasan bagi Maois (*Communist Party of Nepal-Maoist/CPN-M*) yaitu salah satu partai komunis di Nepal yang ideologinya lebih condong pada ajaran Mao Tse Tung dan dipengaruhi oleh Revolusi Kebudayaan dari China⁵ untuk memulai Perang Sipil atau “*People’s War*” pada tahun 1996.⁶ Pada saat melancarkan perang sipil, anggota Maois yang duduk di Parlemen Nepal hanya ada 4 dari 205 kursi. Maois melancarkan perang tersebut karena Perdana Menteri Nepal saat itu (Sher Bahadur Deuba) menolak 40 poin tuntutan yang mensyaratkan restrukturisasi negara termasuk penyusunan konstitusi baru melalui pemilihan majelis konstituante di Nepal.⁷

People’s war atau perang sipil yang dikembangkan oleh Mao merupakan bentuk perang yang tidak biasa (*unusual war*) di mana perang ini mengintegrasikan antara masyarakat, politik, partai komunis, dan urusan militer. Menurut Mao, perang bukan

¹ Yuba Raj Khatiwada, Cooperatives, economic democracy and human security: Perspectives from Nepal. Paper presented at *1st National Cooperative Congress Kathmandu, Nepal*. March 27. 2014. Retrieved from

https://www.nrb.org.np/ofg/events_ofg/Governor's_Speeches--

[Governor's_Presentation_Paper_at_1st_National_Cooperative_Congress_a.pdf](https://www.nrb.org.np/ofg/events_ofg/Governor's_Presentation_Paper_at_1st_National_Cooperative_Congress_a.pdf)

² *Ibid.*

³ Andrew Nelson, *Betrayed by the Neoliberal State, Neglected by the “Jangali” Company: The Anxiety of Autonomy in an Elite Housing Colony in Kathmandu, Nepal*, *City & Society*, Vol. 29, Issue 1. 2017

⁴ Yuba Raj Khatiwada, *Loc. Cit.*

⁵ Arjun Karki dan David Seddon, Chapter 1 *People in Historical Context*. Dalam Karki, Arjun dan Seddon, David (ed.), *The People’s War in Nepal Left Perspectives* (pp. 3-48). Delhi: Adroit Publishers. 2003

⁶ Richard A. Mathew dan Bishnu Raj Upreti, Environmental change and human security in Nepal, Dalam Matthew, Richard A. dkk. (Eds.), *Global environmental change and human security*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 2010

⁷ Basnett, Yurendra. From Politicization of Grievances to Political Violence: An Analysis of the Maoist Movement in Nepal, *Working Paper Series*, March. 2009

merupakan kejahatan moral melainkan sebuah tindakan politik yang dilakukan untuk menghancurkan *status quo* yang sudah mengakar dan untuk memajukan masyarakat serta merupakan bentuk perang pembebasan dari negara semi-kolonial.⁸ Dengan demikian, perang sipil di sini merupakan model perang yang berpusat pada kelas pekerja sebagai kekuatan utama dan kaum tani sebagai pendukung utama revolusi. Sementara pusat gravitasinya berada di pedesaan yang mengelilingi kota-kota, dan revolusi dilakukan melalui Perang Rakyat yang berkepanjangan (*Protracted People's War*).

Perang sipil yang dilancarkan Maois di Nepal berpusat pada enam distrik yaitu Rukum, Rolpa, Jajarkot, Salyan dan Gorkha di daerah *midwestern* dan *western* Nepal serta di Sindhuli bagian *centre-east* Nepal. Empat distrik pertama merupakan basis area inti dan dukungan bagi Maois. Serangan Maois mulai dilancarkan yaitu pada hari pertama saat milisi rakyat dan pasukan komando CPN (Maoist) berhasil menduduki kantor polisi, termasuk pos polisi Athbiskot di Distrik Rukum dan pos polisi Holeri di Distrik Rolpa. Pada hari yang sama, di Distrik Gorkha mereka berhasil menduduki *Small Farmers' Development Project office* dan menyita dokumen kepemilikan tanah yang disimpan sebagai jaminan oleh *Agriculture Development Bank*. Dokumen tersebut kemudian didistribusikan kepada pemilik tanah, sedangkan dokumen pinjaman resmi dan catatan yang disimpan oleh bank tersebut dihancurkan.⁹

Adanya konflik bersenjata dalam perang sipil yang terus berlanjut di Nepal pada akhirnya mendorong kesepakatan untuk mengadakan dialog antara *Seven-party Alliance* (SPA) dan Maois pada 22 November 2005 untuk mematuhi *12-Point Understanding in term of Agreement*. Pihak-pihak yang terlibat dari SPA ini terdiri dari Girija Prasad

Koirala (Nepali Congress), Madhav Kumar Nepal (CPN-UML), Sher Bahadur Deuba (Nepali Congress-Democratic), Amik Sherchan (People's Front), Bharat Bimal Yadav (NSP), Narayan Man Bijukchhe (NWPP) dan C.P. Mainali (United Left Front). Sementara dari Maois diwakili oleh Prachanda (CPN-M).¹⁰ Kesepakatan antara SPA dan Maois ini menjadi basis untuk melaksanakan '*People Movement*' karena Raja Nepal masih ingin mempertahankan kekuasaannya dengan mencari dukungan baik secara internasional maupun dari masyarakat Nepal. Gerakan damai bersama masyarakat yang telah direncanakan tersebut akhirnya memaksa raja melepaskan kekuasaan eksekutif dan mengembalikannya pada rakyat melalui parlemen. Gerakan damai ini berlangsung selama sembilan belas hari hingga tanggal 24 April 2006, yang selanjutnya menandai masa transisi sejarah Nepal dengan peresmian Perjanjian Perdamaian Komprehensif (*Comprehensive Peace Agreement/ CPA*) pada 16 November 2006.

Perjanjian perdamaian yang telah disepakati untuk mengakhiri perang sipil selama satu dekade sebelumnya dilakukan dalam upaya transformasi ekonomi dan sosial. Namun, pemerintah masih belum mampu mencapainya. Konflik di Nepal sendiri berakar dari kemiskinan yang ekstrim, masyarakat feodal, marjinalisasi dan pengucilan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Pengucilan politik, ekonomi dan sosial dilakukan berdasarkan pada kelas, kasta, gender, etnis, serta geografi dan telah berkembang sebelumnya menjadi konflik bersenjata. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Nepal belum mampu mencapai *freedom from fear* maupun *freedom from want*. Bahkan, kekerasan struktural masih terjadi di mana pasca transisi konflik tersebut telah muncul sistem pasar yang baru lahir melalui sektor swasta namun

⁸ Prashant Kumar Singh, *Changing Contexts of Chinese Military Strategy and Doctrine. IDSA Monograph Series No. 49* March. 2016

⁹ Arjun Karki dan David Seddon, *Op.Cit.*

¹⁰ Padma Prasad Khatiwada, *The Nepalese Peace Process: Faster Changes, Slower Progress, Inclusive Political Settlements Paper 9*. Berlin: Berghof Foundation. 2014.

belum dapat memberikan dasar kesetaraan kepada orang-orang yang dikecualikan dalam golongan tersebut.¹¹

Dari segi kebijakan yang ada di Nepal, setelah Perjanjian Damai pada tahun 2006, *High Level Commission for Scientific Land Reform 2008* dan *High Level Commission for Land Reform 2009* dibentuk sebagai bentuk teknis dan rencana aksi dalam kepemilikan lahan serta kebijakan pertanian. Sementara Undang-undang Tanah 1964, sebelumnya sebenarnya telah mengakhiri tradisi panjang dalam menawarkan hibah tanah untuk bangsawan dan fungsionaris negara. Karena *nexus elite* (sebagai akibat dari struktur kekuasaan yang ada) ketentuan-ketentuan konstitusional masih belum dilaksanakan secara adil sehingga program reformasi tanah tersebut secara konsisten gagal untuk menyampaikan komitmen mereka. Padahal dalam konteks sosial yang tinggi seperti kasta, suku dan jenis kelamin dan keragaman geografis, memerlukan strategi reformasi tanah yang jelas untuk identifikasi penerima manfaat atas kelompok yang secara historis rentan dikecualikan dari akses yang aman terhadap lahan dan kepemilikannya.¹²

Dengan aturan yang jelas, termasuk dalam tata kelola kepemilikan lahan yang memiliki prinsip-prinsip universalitas jaminan kepemilikan, partisipasi yang adil, kepatuhan terhadap aturan hukum, keberlanjutan, dan efektivitas dan efisiensi, maka orang miskin dan kelompok yang dikecualikan akan memiliki akses ke sumber daya dan lahan tersebut.¹³ Namun, pemerintah Nepal telah gagal untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial-ekonomi berdasarkan sistem tanah yang ada, sistem kasta dan relasi gender. Hal disebabkan terutama oleh kurangnya kemauan politik untuk mengatasi masalah struktural yang

terkait dengan kepemilikan tanah untuk memastikan lahan hak atas tanah petani miskin dan kaum proletar pedesaan yang tidak memiliki lahan.¹⁴ Oleh sebab itu, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh rezim politik dan ekonomi terhadap keamanan manusia di Nepal khususnya yang terkait dengan aspek keamanan ekonomi pasca perang sipil tahun 1996-2006.

Selama ini kajian yang menganalisis tentang Perang Sipil di Nepal lebih banyak menganalisis tentang konteks sejarah perang dan bagaimana perang berlangsung seperti kajian dari Karki dan Seddon¹⁵, Verma dan Navlakha¹⁶, dan Mage¹⁷. Beberapa tulisan lain juga hanya menekankan bagaimana kaitan antara peran militer dengan proses perdamaian di Nepal pasca konflik misalnya tulisan dari Upreti. Namun masih jarang ditemukan kajian-kajian yang menganalisis tentang pendekatan rezim ekonomi dan politik sebagai akar dari munculnya ketidakamanan ekonomi pasca Perang Sipil di Nepal. Oleh sebab itu, Penulis berusaha mengisi gap dalam kajian tentang Perang Sipil di Nepal dari perspektif tersebut.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka. Menurut Snape dan Spencer, pendekatan kualitatif berfungsi untuk membahas pertanyaan penelitian yang membutuhkan penjelasan atau pemahaman tentang fenomena maupun konteks sosial.¹⁸ Untuk menjelaskan konteks sosial di sini dibutuhkan sebuah teori sebagai

¹¹ Yuba Raj Khatiwada, *Op.Cit.*

¹² Bharat Nepali, Negotiating access to land and tenure security for economic growth in Nepal. Paper Prepared for Presentation at "Conference On Land And Poverty" The World Bank - Washington Dc, March 23-27, 2015.

¹³ *Ibid*, 12.

¹⁴ *Ibid*, 14.

¹⁵ Arjun Karki dan David Seddon, *Op.Cit.*

¹⁶ A.S. Verma dan Gautam Navlakha, People's War in Nepal: Genesis and Development. *Economic and Political Weekly*, May 19. 2007.

¹⁷ John Mage, The Nepali Revolution and International Relations, *Economic and Political Weekly*, May 19. 2007.

¹⁸ D. Snape, dan L.Spencer, The Foundation of Qualitative Research. Dalam Ritchie, Jane dan Lewis, Jane (Ed.), *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Student and Researchers* (pp.1-23). London, UK: Sage Publication. 2003, p. 5

pijakan analisis. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell bahwa dalam desain penelitian kualitatif, teori dapat muncul di awal sebagai lensa analisis terhadap sebuah fenomena sosial atau konteks sosial dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan peneliti.¹⁹ Oleh sebab itu, penulis menggunakan teori dan konsep keamanan ekonomi dan rezim ekonomi politik sebagai lensa analisis dalam konteks pasca-Perang Sipil di Nepal.

Hubungan antara Rezim Ekonomi Politik dengan Konsep Keamanan Manusia

Fenomena perang pasca berakhirnya Perang Dunia II sebagian besar tidak lagi diwarnai oleh konflik antar negara namun lebih mengarah kepada perang sipil yang terjadi di dalam negara itu sendiri. Oleh sebab itu, konsep keamanan dari ancaman eksternal menjadi kurang relevan apabila dikaitkan dengan para korban akibat perang saudara atau perang sipil tersebut.²⁰

Pergeseran isu keamanan dari *high politic issues* ke *low politic issues* berimplikasi pada konstelasi global di tiap negara yang menanggapi perubahan tersebut secara berbeda-beda. Munculnya pemikiran Mahbub ul-Haq yang meluncurkan *Human Development Report* pada tahun 1990 di PBB menyebutkan bahwa pembangunan harus berfokus pada masyarakat, peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik, maupun kesejahteraan ekonomi. Pemikiran tersebut kemudian mendasari perubahan terhadap isu keamanan yang bergeser dari negara menjadi individu sehingga ide tentang keamanan manusia ini membuat keamanan dan pembangunan menjadi saling bersinggungan.²¹

¹⁹ J.W. Creswell, *Research Design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*, 4th Edition. London, UK: Sage Publications. 2014, p. 67.

²⁰ Nikolaos Tzifakis, Problematizing human security: a general/ contextual conceptual approach. *Southeast European and Black Sea Studies*, Vol 11 No 4 (pp. 353-368). 2011.

²¹ Hidayat Chusnul Chotimah, et al. Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human

Berdasarkan Laporan UNDP (1994) keamanan manusia (*human security*) pada dasarnya mencakup dua hal yaitu “perlindungan dari gangguan tiba-tiba dan berbahaya dalam pola kehidupan sehari-hari” dan “keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi”, atau yang sering disebut sebagai *freedom from fear* dan *freedom from want*.²² Hal ini mendasari tujuh kategori penting dalam keamanan manusia yaitu ekonomi, pangan, kesehatan, pribadi, lingkungan, masyarakat, dan keamanan politik. Keamanan manusia merupakan “*people-centered*” yang menempatkan individu sebagai pusat analisis sehingga menyoroti ancaman yang mengancam kelangsungan hidup dan martabat manusia. Dalam hal ini, manusia menjadi tujuan pembangunan sehingga tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi atau hukum koherensi semata.²³

Jika mengacu pada Laporan UNDP (1994), istilah keamanan manusia pada dasarnya telah meminggirkan wacana dan praktik keamanan nasional (negara) yang berfokus pada aspek penggunaan kekuatan militer dan ancaman eksistensial terhadap teritorial negara. Dalam hal ini, konsep keamanan manusia justru mengkhawatirkan keberadaan negara yang sering mengancam bukannya melindungi warga negaranya.²⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Newman yang menyebutkan bahwa untuk sebagian orang, ancaman terbesar bukan berasal dari musuh

Security. Transformasi Global, Vol 4 No 1 (pp. 65-66). 2017, 68.

²² United Nation Development Programme. *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press. 1994

²³ Sabina Alkire, A conceptual framework for human security,” *Working Paper 2*, (Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE), 2003) p. 3.

²⁴ Pauline Ewan, Deepening the Human Security Debate: Beyond the Politics of Conceptual Clarification. *Politics*, Vol 27 No. 3 (pp. 182-189). 2007, p. 182.

eksternal melainkan datang dari negara mereka sendiri.²⁵

Banyak sekali konflik yang terjadi di suatu negara yang berakar dari masalah sosial dan ekonomi serta yang menyangkut bentuk-bentuk politik identitas yang saling berkompetisi sehingga menambah penderitaan bagi warga negaranya. Terlebih adanya perang sipil yang terjadi di dalam suatu negara akan memaksa warga negara untuk melakukan migrasi ke daerah atau negara lain yang lebih aman.²⁶

Purnendra Jain menjelaskan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia dapat datang dari eksternal yaitu ancaman negara lain dalam bentuk perang di mana warga sipil ikut menderita, maupun secara internal dengan adanya represi politik, pemerintahan yang gagal, pemerintahan yang buruk, atau melalui bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi.²⁷ Sementara Pauline Ewan menyebutkan bahwa rezim politik yang represif dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi warganya dengan melakukan penolakan hak asasi manusia dari warga negaranya, distribusi sumber daya yang tidak merata, atau penggunaan angkatan bersenjata sebagai cara penindasan untuk mewujudkan tujuan politik dari elit yang berkuasa.²⁸

Menurut Sadoko Ogata, gagasan tentang keamanan manusia merupakan sarana yang digunakan untuk menerapkan hak asasi manusia. Di sini, keamanan manusia secara konseptual berarti memberikan kesetaraan dalam mengakses hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya. Hal ini diperkuat oleh Alkire yang menyebutkan bahwa untuk

mengoperasionalkan konsep keamanan manusia, negara memiliki tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia bagi warganya dan apabila negara tidak mampu menjalankan fungsi tersebut maka organisasi internasional wajib menggantikan fungsi negara mengingat bahwa pemenuhan terhadap hak asasi manusia sendiri merupakan kewajiban universal.²⁹

Melihat beberapa studi terdahulu yang mempertentangkan antara konsep keamanan manusia dan keamanan nasional, memunculkan gagasan bahwa peran negara seharusnya tetap hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dari ancaman-ancaman yang dimungkinkan timbul. Melalui tata kelola rezim ekonomi dan politik yang baik, penulis beranggapan bahwa negara seharusnya hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya sehingga *freedom from fear* dan *freedom from want* pun tercapai. Dengan demikian, tidak hanya faktor dari rezim politik yang ada di suatu negara tetapi keberadaan sebuah rezim ekonomi yang diterapkan juga akan berdampak terhadap kebebasan warga negara dalam mengakses kebutuhan dasar mereka.

Jika mengutip pendapat Bernholz, rezim ekonomi politik (*a political-economic regime*) merupakan “*the set of relatively stable and long-lasting rules (including the legal system), rights and government organizations within and through which it operates*”.³⁰ Seperangkat aturan dan kewenangan lembaga pemerintah di sini tidak hanya mencakup sistem politik yang diterapkan dan aktor-aktor politik yang terlibat di dalamnya tetapi juga menyangkut sistem ekonomi yang ada di negara tersebut.

²⁵ Edward Newman, Human Security and Constructivism, *International Studies Perspectives*, 2 (pp. 239-251). 2001, p. 240.

²⁶ *Ibid*, 243-244.

²⁷ Mohammad Kamrul Ahsan, Revisiting the concept of human security, *Philosophy and Progress*, 59 (1-2), pp. 9-42. 2018, p. 16.

²⁸ Pauline Ewan, The Human Security Agenda in World Politics. Dalam Bilgin, P. et al, *Global Security and International Political Economy* - Vol. I (pp. 133-157). United Kingdom: Eolss Publishers/ UNESCO. 2010.

²⁹ Taylor Owen, *The Uncertain future of human security in the UN*. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. 2008, p.121

³⁰ Peter Bernholz, Causes of Change in Political-Economic Regimes. In Borner, Silvio dan Paldam, Martin (Ed.), *The Political Dimension of Economic Growth* (pp. 74-94). Proceedings of the IEA Conference held in San Jose, Costa Rica. London: Palgrave Macmillan. 1998.

Banyak sekali perdebatan para ahli mengenai sistem ekonomi dan politik yang perlu diterapkan oleh sebuah negara. Studi yang dilakukan oleh Przeworski et al.³¹ menelaah tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan rezim politik yang diterapkan oleh negara. Selanjutnya Winters³² lebih menekankan pada aspek hubungan antara liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara Imam dan Salinas menyebutkan bahwa laporan terhadap 22 negara Afrika bagian barat selama periode 1960-2006 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat terkait erat dengan guncangan eksternal, liberalisasi ekonomi, stabilitas politik serta keterlibatan dari partai politik dalam sebuah pengambilan kebijakan ekonomi dan politik.³³ Literatur-literatur tersebut masih berbicara aspek dominan dari negara dan pasar sebagai titik tolak dalam mencapai kemapanan ekonomi. Sementara aspek individu masih diabaikan dalam analisisnya.

Salah satu literatur yang sedikit membahas tentang peran rezim ekonomi dengan keamanan ekonomi dapat penulis temukan dari studi yang dilakukan oleh Branco. Menurut Branco, rezim ekonomi pasar tidak mampu memenuhi hak asasi manusia karena memiliki dimensi rasionalitas yang berbeda sehingga pasar dalam hal ini tidak mampu memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial dari masyarakat.³⁴

Berpijak dari studi yang dilakukan oleh Branco dan sintesis dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis berusaha

menganalisis antara variabel rezim ekonomi dan politik yang dihubungkan dengan mengambil salah satu elemen keamanan manusia yaitu keamanan ekonomi sebagai fokus analisisnya. Keamanan ekonomi di sini tidak berfokus pada aspek makroekonomi yaitu pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, melainkan lebih menekankan pada bagaimana individu mampu mengakses pendapatan dan terbebas dari kemiskinan sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Dampak Perang Sipil Terhadap Keamanan Ekonomi di Nepal

People's War yang terjadi di Nepal telah mengakibatkan *human insecurity* yang menyebabkan kebinasaan masyarakat setempat. Akibat dari perang selama sepuluh tahun tersebut menyebabkan 13.000 jiwa meninggal, lebih dari 200.000 orang terlantar, dan emigrasi dari sekitar 1,8 juta jiwa. Sementara hasil penelitian dari *Ministry of Peace and Reconstruction* (2005) menyebutkan bahwa dari 73 kabupaten setidaknya terdapat 16.278 korban yang tewas akibat pemberontakan dan perang tersebut. Di antara distrik-distrik yang mengalami dampak terparah dengan jumlah korban meninggal tertinggi adalah Rolpa, Rukum dan Achham.³⁵ Selain itu, selama perang terjadi, sebanyak dua belas ribu perempuan muda diperdagangkan ke India setiap tahun, sementara sarana infrastruktur seperti ratusan sekolah juga hancur dan terjadi pelecehan seksual terhadap guru dan mahasiswa.

Setelah penandatanganan CPA, isu dalam konteks keamanan (*security*) di Nepal sempat dibahas tetapi hanya melibatkan segelintir kelompok dan masih terbatas pada mantan pejabat pasukan keamanan dan birokrat di Nepal sehingga isu keamanan yang dibahas pun terkonsentrasi dalam masalah keamanan tradisional (militer bukan individu/ rakyat). Di

³¹ A. Przeworski, M. Alvarez, J. A. Cheibub & F. Limongi, *Democracy and development: Political regimes and economic well-being in the world 1950–1990*. New York: Cambridge University Press. 2000.

³² L. A. Winters, Trade liberalisation and economic performance: An overview. *The Economic Journal*, 114 (493). 2004.

³³ P. Imam & G. Salinas, Explaining episodes of growth accelerations, decelerations, and collapses in Western Africa. *IMF Working Paper*, 08/287. 2008.

³⁴ M.C. Branco, Can Markets Secure Economic and Social Human Rights?. *International Critical Thought*, 5:1 (pp. 80-94). 2015.

³⁵ Birendra Mishra, Strength and weaknesses of the Nepalese peace process. Paper submitted to Seminar on “Building Bridges for Peace in Nepal” pada 6-7 Oktober 2009, 9.

sini, kebijakan keamanan dipandu oleh kebijakan dan program *ad hoc* dan bersifat tidak transparan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran akan kebijakan keamanan maupun strategi dan isu-isu tata kelola sektor keamanan di antara elit yang memerintah di Nepal maupun keberadaan Dewan Keamanan Nasional di bawah Kementerian Pertahanan yang belum dilembagakan dengan baik.³⁶

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa *human security* memiliki tujuh aspek atau komponen yang terdiri dari *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security* dan *political security*. Namun demikian, aspek atau komponen dalam *human security* masih perlu diperluas ke dalam isu-isu yang semakin menjadi ancaman bagi negara-bangsa dan manusia dewasa ini. Meningkatnya perselisihan sipil (*civil strife*), konflik bersenjata (*armed conflicts*) dan *intra-state war* merupakan peristiwa yang membutuhkan *concern* dalam pembahasan *human security*.³⁷

Dari perspektif keamanan manusia, konflik di Nepal menjadi semakin brutal selama periode perang ini terjadi, sehingga banyak penelitian yang dilakukan oleh PBB dan berbagai kelompok hak asasi manusia untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada seperti melalui bantuan dana maupun bentuk aksi sosial yang melibatkan jasa mereka.³⁸ Dalam konteks ini, keamanan manusia di Nepal tidak akan pernah tercapai tanpa adanya pemenuhan terhadap kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak melalui jaminan dalam aspek kegiatan politik, sosial dan ekonomi. Adanya ketakutan terhadap

kelaparan, penyakit, kejahatan maupun represi di sinilah yang patut diperhatikan oleh semua pihak.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam aspek keamanan manusia adalah keamanan ekonomi. Menurut UNDP keamanan ekonomi merupakan sebuah kondisi yang mensyaratkan pemasukan tetap yang layak bagi setiap orang yang bisa dicapai dari pekerjaan yang layak maupun dari jaringan pengamanan sosial yang dibiayai publik (negara).³⁹

Jika dilihat dari pendekatan tradisional, keamanan ekonomi merupakan instrumen dari suatu negara untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan di negara lain, sehingga ketidakamanan ekonomi menyangkut ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap negara lain. Definisi keamanan ekonomi tersebut kemudian bergeser dan mengarah pada situasi dimana seseorang memiliki sumber pendapatan keuangan yang stabil dan memungkinkan terpeliharanya standar pemenuhan kehidupannya dalam waktu dekat sehingga tidak terjadi kesenjangan di tengah masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*).⁴⁰ Dengan demikian, ketidakamanan ekonomi dalam perspektif keamanan manusia (*human security*) berkaitan erat dengan minimnya penghasilan seseorang dan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan kata lain, keamanan ekonomi mengacu pada standar hidup manusia (individu maupun komunitas individu) termasuk perlindungan terhadap kemiskinan dan ketersediaan terhadap jaminan sosial.⁴¹

Dalam hal ini, keamanan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan komponen keamanan manusia lainnya seperti keamanan pangan, keamanan personal, keamanan komunitas, keamanan politik, dan keamanan lingkungan sehingga keamanan ekonomi dapat menjadi sarana untuk mencapai

³⁶ Bishnu Raj Upreti et al., *Human Security in Nepal: Concepts, Issues and Challenges*. Kathmandu: Nepal Institute for Policy Studies (NIPS) and South Asia Regional Coordination Office of NCCR (North-South). 2013

³⁷ Upreti, Bishnu Raj, et al. *Op.Cit.*, 5.

³⁸ Richard A. Mathew dan Bishnu Raj Upreti, *Op.Cit.*, 142-143.

³⁹ Chotimah, HC, et al. *Op.Cit.*, 68.

⁴⁰ *Ibid*, 69.

⁴¹ *Ibid*, 74

freedom from want yaitu kebebasan untuk memperoleh makanan, tempat tinggal, akses ke perawatan kesehatan, dan sebagainya. Bahkan, aspek keamanan ekonomi yang diabaikan di suatu negara dapat memicu terjadinya konflik sipil seperti yang terjadi di Nepal.

Konflik bersenjata yang dilancarkan melalui *People's War* di Nepal memiliki dampak yang luas pada ekonomi nasional dan lokal di zona konflik. Terlebih konflik yang terjadi di Nepal salah satunya dipicu oleh adanya ketidaksetaraan ekonomi di kalangan masyarakat, sehingga pemulihan terhadap keamanan ekonomi menjadi aspek penting untuk meminimalkan risiko konflik lebih lanjut. Adanya hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara konflik dan akar penyebab konflik yaitu salah satunya ekonomi, pemulihan ekonomi dan pembangunan menjadi prasyarat sekaligus penentu dalam membangun perdamaian di Nepal.⁴²

Ketidakamanan Ekonomi sebagai Kelanjutan Rezim Ekonomi dan Politik di Nepal

Setelah berakhirnya konflik bersenjata selama satu dekade yang dipelopori oleh Maois (CPN-M) Nepal, telah mengantarkan negara ini menuju transisi politik yang sangat rapuh. Sejak penandatanganan CPA, proses perdamaian di Nepal berbasis pada tiga pilar menuju perdamaian yaitu reintegrasi mantan pejuang Maois, restrukturisasi negara berdasarkan prinsip-prinsip federalisme, dan menyusun konstitusi baru untuk Nepal. Sementara itu, dimensi ekonomi sebagai salah satu aspek penting yang sebelumnya juga menjadi legitimasi Maois untuk melancarkan *People's War* ini dipinggirkan.⁴³

Nepal merupakan salah satu negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita US

\$ 624 dan tingkat pengangguran 46 persen.⁴⁴ Setelah berakhirnya perang sipil yang telah berlangsung selama satu dekade, Nepal menderita kelanjutan dari sindikat rezim politik dan ekonomi. Yang dimaksud sindikat rezim politik jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gabungan (kerja sama) beberapa orang (perusahaan dan sebagainya) yang bergerak dalam bidang politik (pemerintahan).⁴⁵ Dengan demikian yang dimaksud sindikat rezim politik dan ekonomi di Nepal adalah orang-orang di Nepal yang berkuasa baik yang duduk di dalam kursi pemerintahan maupun yang memiliki pengaruh terhadap pemerintahan di Nepal serta menguasai aspek ekonomi dan politik di sana.

Sindikat rezim politik dan ekonomi di Nepal tidak terlepas dari transformasi sosial dan politik dalam proses perdamaian Nepal yang telah disepakati antara Maoist dan SPA yang berisi tentang aspirasi dan visi berikut:

- *Common Minimum Programme* (CMP) untuk transformasi sosial-ekonomi dalam rangka mengakhiri semua bentuk feodalisme harus disiapkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip saling pengertian.
- Merumuskan kebijakan untuk melaksanakan *land reform programme* dengan menghapus praktik kepemilikan tanah feodal.
- Kebijakan untuk melindungi dan mempromosikan industri dan sumber daya nasional harus diikuti.
- Kebijakan harus dibentuk untuk menetapkan hak-hak semua warga negara atas pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan dan ketahanan pangan.

⁴² D.B. Subedi, Economic dimension of peacebuilding: Insight into Post-conflict Economic Recovery and Development in Nepal. *South Asia Economic Journal*, 13, 2 (p.314). 2012

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ramesh Sunam dan Keshab Goutam, The rise of Maoists in Nepali politics: from 'people's war' to democratic politics. *East Asia Forum* (Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific, 2013). Retrieved from <http://www.eastasiaforum.org>.

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Retrieved from <https://kbbi.web.id/sindikat>

- Kebijakan pemerintah harus diupayakan untuk menyediakan tanah/ lahan dan keamanan sosial-ekonomi bagi masyarakat terbelakang seperti penghuni liar yang tidak memiliki tanah, buruh kontrak, penggarap, pekerja rumah tangga dan kelompok-kelompok lainnya khususnya yang masih bersifat kontrak.
- Konsep pembangunan bersama (*common development concept*) harus diadopsi untuk transformasi sosial-ekonomi negara dan untuk membuat negara maju dan makmur secara ekonomi dalam cara yang adil dalam rentang waktu yang singkat.

Meskipun visi tersebut terdapat dalam CPA yang telah ditandatangani dan disepakati bersama, visi pembangunan ekonomi yang diartikulasikan dalam CPA, sebagian besar lebih menekankan pada upaya mereformasi kepemilikan tanah dan pembangunan industri. Dalam hal ini, pemerintahan baru di Nepal masih sangat lemah dan rentan terhadap masalah pembagian kekuasaan di tingkat nasional. Hal ini terlihat dalam Pemilihan Majelis Konstitusi (*Constitution Assembly/ CA*) yang diadakan pada bulan April 2008 tidak memberikan suara mayoritas absolut kepada partai manapun di CA dan menghasilkan pembentukan aktor politik berbasis regional dan identitas baru, seperti Madhesi Jana Adhikar Forum (MJF), Terai Madhesh Democratic Party (TMDP), dan Nepal Sadhbahawana Party (NSP), sebagai pemain kunci dalam pemerintahan nasional. Ketidakjelasan transformasi ekonomi dalam CPA tersebut pada saat yang sama meninggalkan ambiguitas dan kebingungan di antara para aktor politik dalam menyusun strategi dan rencana pembangunan ekonomi Nepal.⁴⁶

Aktor politik utama yang bermain di dalam pemerintahan Nepal adalah para pemimpin partai politik. Dengan tidak adanya

partai yang memiliki suara mayoritas, maka ada tawar-menawar yang berkelanjutan antara berbagai kelompok partai yang kemudian menumbuhkan sistem pemerintahan sebagai kartel partai (*party-cartel*). Tiga kekuatan utama dalam partai di Nepal ini adalah Kongres, UML dan Maois, dengan dukungan bergeser dari partai-partai monarkis, dan/ atau partai-partai Madhesi regional/ lokal. Istilah kartel menjadi sangat cocok mengingat aktor politik tersebut terkait erat dengan kepentingan bisnis yang pada gilirannya beroperasi sebagai kartel di banyak sektor, baik yang dilakukan melalui jalur hukum maupun di luar batas hukum.⁴⁷ Oleh sebab itu, agenda dalam CPA terkait pencapaian keamanan ekonomi yang sebelumnya menjadi akar penyebab konflik dan *People's war* di Nepal termasuk di dalamnya menyangkut ketidaksetaraan ekonomi atau kemiskinan yang dialami oleh masyarakat menjadi bukan prioritas bagi sindikat rezim politik dan ekonomi dalam lingkungan kartel tersebut.

Munculnya Kemiskinan Moneter dan Non-Moneter sebagai Dampak Kegagalan Rezim Ekonomi Neoliberal di Nepal

Persepsi kemiskinan sendiri sebagai aspek dalam keamanan ekonomi telah berkembang dan sangat bervariasi dari satu budaya ke budaya lain.⁴⁸ Namun, definisi tersebut telah melebur dan mencakup berbagai masalah, bergerak menuju fenomena perbaikan ekonomi untuk mengambil sejumlah fenomena sosial. Seperti disebutkan oleh Amartya Sen yang memperkenalkan konsep "*deprivation of basic capabilities*" sebagai pelengkap dari "*lowness income*"⁴⁹ di mana kemiskinan memiliki dua dimensi yang luas yaitu: moneter

⁴⁷ Magnus Hatlebakk, *Nepal: A Political Economy Analysis*, Oslo: Norwegian Institute of International Affairs. 2017.

⁴⁸ N. P. Joshi, K. L. Maharjan dan Luni Piya, Poverty and food insecurity in Nepal: A review. *Journal of International Development and Cooperation*, Vol. 16, No.2 (pp. 1-19). 2010.

⁴⁹ Amartya Sen, *Development as Freedom*, New York: Alfred A. Knopf. 1999.

⁴⁶ D.B. Subedi, *Op.Cit*, 326

dan non-moneter. Dalam hal ini, kemiskinan moneter adalah ukuran kuantitatif kemiskinan yang menggunakan indikator pendapatan atau konsumsi, sedangkan kemiskinan non-moneter dikaitkan dengan hasil yang cukup sehubungan dengan kesehatan, gizi, melek huruf, hubungan sosial, rasa tidak aman, rendahnya kepercayaan diri dan ketidakberdayaan.⁵⁰

Meskipun pendapatan per kapita mencapai US \$ 388 per tahun pada tahun 2008, negara ini masih tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia dengan perbedaan pendapatan yang lebar, dan akses yang buruk bagi sebagian besar penduduk terhadap pelayanan dasar dan sosial (Asian Development Bank, 2008). Dalam hal ini, kemiskinan menjadi penyebab serta akibat dari kerawanan pangan. Indikator kerawanan pangan di Nepal menjadi lebih buruk setelah bergeser dari negara swasembada pangan yaitu eksportir makanan bahkan sampai tahun 1970-an kemudian menjadi negara defisit makanan sejak awal 1980-an. Sementara pada tahun 2010, sebesar 17 persen dari populasi di Nepal menderita kekurangan gizi.⁵¹ Kerentanan ini tidak hanya menjadi komponen kemiskinan itu sendiri, tetapi juga merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan dimana ketidakmampuan untuk mengatasi risiko sering mendorong orang terperangkap lebih dalam kemiskinan. Sebuah kegagalan untuk mengelola risiko memiliki dampak yang berlangsung jauh melampaui keadaan kekurangan terkait pendapatan yang diterima. Hal ini yang kemudian juga mempengaruhi modal manusia dan aspek sosial serta membatasi peluang untuk meningkatkan kondisi hidup mereka.⁵² Menurut Dahal, salah satu penyebab munculnya ketidakamanan ekonomi di Nepal disebabkan oleh kebijakan neo-liberal yang diadopsi oleh Nepal dalam penghapusan subsidi pupuk, benih unggul, irigasi, dan kredit yang telah mengurangi

produktivitas pertanian, peningkatan kemiskinan di pedesaan, dan kelangkaan pangan.⁵³ Nepal mulai menerapkan kebijakan neo-liberal melalui program penyesuaian struktural (*structural adjustment program/ SAP*) IMF dan *World Bank* sejak pertengahan 1980-an, dengan harapan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi setelah menghadapi defisit neraca pembayaran (*balance of payments/ BOP*) secara terus-menerus di paruh pertama tahun 1980-an. Selain SAP, Nepal juga melaksanakan *Poverty Reduction and Growth Facility* atau program PRGF dari IMF pada tahun 2007 yang dimaksudkan untuk mengurangi tekanan BOP. Namun dalam praktiknya, dimensi tingkat kemiskinan masih tinggi bahkan setelah PRGF.⁵⁴

Bisa dilihat bahwa lebih dari 30 persen dari populasi yang aktif secara ekonomi benar-benar menganggur dan hanya 10 persen hak-hak minimum pekerja yang terjamin. Bahkan rata-rata upah minimum bulanan bagi pekerja (gaji pokok \$87,32: \$50 dan tunjangan \$37,32) hampir tidak cukup untuk memberi makan termasuk dalam keluarga inti mereka. Tingkat inflasi tahunan rata-rata lebih dari 10 persen. Sementara upah harian untuk pekerja industri adalah \$3,25 sedangkan untuk pekerja pertanian belum ditentukan (sebelumnya adalah \$1,08). Dahal juga menyebutkan bahwa di antara jumlah penduduk yang dipekerjakan, sebesar 46 persen dari mereka mendapatkan gaji bulanan, sisanya bekerja kontrak, gaji mingguan dan upah harian. Hal ini menyebabkan kondisi yaitu 78 persen penduduk hidup dengan kurang dari \$2 per hari.⁵⁵

⁵⁰ N. P. Joshi, K. L. Maharjan dan Luni Piya, *Loc.Cit.*

⁵¹ *Ibid*, 2.

⁵² *Ibid*, 17.

⁵³ Dev Raj Dahal. *Shaping tomorrow's economy: Challenges and Choices for Nepal*, Paper Presented at a *High-Level Seminar organized by FES and GEFONT on July 10-11, Kathmandu, Nepal*. 2011.

⁵⁴ Prakash Kumar Shrestha, *Structural Changes and Economic Growth in Nepal* (October 19, 2010) p.5. Retrieved From https://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/conference_papers/newschool/prakash.pdf.

⁵⁵ Dev Raj Dahal, *Loc.Cit.*

Sementara Hatlebakk menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan meningkat khususnya untuk masyarakat etnis Rai, Tamang, Libbu dan Sarki yaitu antara 1995-1996 dan 2003/2004 di mana sebagian besar masyarakat tersebut hidup di wilayah *Eastern Hills*.⁵⁶ Dengan melihat kondisi kemiskinan yang ada di Nepal, di lain pihak, estimasi moneter pendapatan penduduk tidak memadai dalam memproyeksikan kemiskinan yang timbul dari kurangnya kesempatan terhadap akses mata pencaharian, pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial. Kontribusi pajak terhadap PDB pun hanya 12 persen dan tidak cukup untuk mensubsidi kesejahteraan maupun dalam menciptakan akuntabilitas pemerintah yang bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki sedikit insentif untuk membangun kapasitas politik dan organisasi untuk bernegosiasi dan mengumpulkan pendapatan maupun pengeluaran secara efektif.⁵⁷

Kegagalan Rezim Politik di Nepal dalam Menjaga Keamanan Ekonomi

Kurangnya tata kelola yang baik (*good governance*) dan tidak adanya supremasi hukum telah mendorong elit politik pemerintahan Nepal yang berkuasa untuk melakukan korupsi. Dalam hal ini, Indeks korupsi di Nepal yang dirilis oleh *Transparency International* pada tahun 2014 adalah 29 pada skala 0 hingga 100 di mana 0 menunjukkan paling korup dan 100 menunjukkan sangat bersih. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang didasarkan pada sistem ekonomi liberal dan ketergantungan pemerintah Nepal terhadap bantuan asing dengan tidak didukung oleh *good governance*, telah melumpuhkan kapabilitas pemerintah Nepal dalam menangani masalah

ketidakamanan ekonomi yang dialami masyarakat.⁵⁸

Upaya Penanggulangan Ketidakamanan Ekonomi di Nepal

Berdasarkan laporan MDGs tahun 201, Nepal dapat mencapai sebagian besar target ekonominya jika pemerintah mampu mengelola sumber daya dan membangun kelembagaan serta kapasitas pelaksanaan kebijakan intervensi yang strategis. Nepal bagaimanapun, menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mencapai target pencapaian penuh dan lapangan kerja produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua kalangan, termasuk perempuan dan kaum muda. Perdagangan dan industri Nepal yang berada dalam krisis dan produktivitas pertanian yang rendah seperti kurangnya akses terhadap kredit yang terjangkau dan ketertiban hukum yang lemah menandakan situasi perekonomian Nepal yang lemah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Nepal masih terjebak dalam kemiskinan sementara perlindungan dan layanan sosial keamanan untuk pekerja mengalami tantangan karena lebih dari 90 persen dari total angkatan kerja beroperasi di luar ekonomi formal.⁵⁹ Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Nepal untuk menanggulangi ketidakamanan ekonomi yaitu melalui perlindungan sosial.

Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial (*social protection*) dapat didefinisikan sebagai tindakan publik dalam merespon tingkat kerentanan (*vulnerability*), risiko (*risk*), dan perampasan (*deprivation*) yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial dalam suatu

⁵⁶ Madhab Karkee, Nepal economic growth assessment agriculture, *Nepal, Kathmandu: USAID*, 2008.

⁵⁷ Dev Raj Dahal, *Loc. Cit.*

⁵⁸ Kamal Raj Dhungel, Contribution of Foreign Aid in Nepal's Economy (2015-04-01), Retrieved from <http://www.newbusinessage.com/MagazineArticle/s/view/1137>.

⁵⁹ D.R. Khanal, *Social security/Social protection in Nepal: Situation analysis*, Nepal: ILO. 2013.

pemerintahan atau masyarakat tertentu.⁶⁰ Menurut International Labour Organization (ILO), perlindungan sosial berkaitan dengan sejumlah institusi publik, norma-norma dan program-program yang ditujukan untuk melindungi para pekerja dan keluarganya dari kemungkinan yang dapat mengancam standar dasar kehidupan mereka. Dalam hal ini, ILO membagi jenis perlindungan sosial dalam tiga kelompok yaitu asuransi sosial (*social insurance*), bantuan sosial (*social assistance*) dan *labour market regulation*. *Social insurance* mencakup perlindungan terhadap kehamilan (*maternity*), lansia (*old age*), maupun pengangguran (*unemployment*). *Social assistance* berkaitan erat dengan penanggulangan kemiskinan (*poverty*). Sementara *labour market regulation* merupakan aspek yang digunakan untuk memastikan standar dasar di tempat kerja (termasuk sistem upah, jam kerja, dan sebagainya), serta memperluas hak untuk berorganisasi dan berpendapat.⁶¹

Upaya perlindungan sosial akan meningkatkan manajemen risiko dan memfasilitasi pengembalian yang lebih tinggi atas investasi terhadap orang-orang miskin dengan cara mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan memperluas kemampuan individu yang rentan dan membantu mereduksi kemiskinan. Di negara-negara maju perlindungan sosial lebih menekankan pada aspek pemeliharaan pendapatan dan perlindungan standar hidup untuk semua orang (khususnya pekerja). Berbeda halnya di negara-negara berkembang, di mana fokus perlindungan sosial tidak

terbatas pada kompensasi terkait keterbatasan pendapatan pekerja, tetapi mereduksi tingkat kemiskinan dan memberikan dukungan bagi golongan termiskin berdasarkan risiko dan kerentanannya. Dengan kata lain, penyebab kemiskinan perlu ditangani dan tidak hanya gejalanya saja. Hal ini juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam pertumbuhan ekonomi, melindungi golongan yang paling rentan, dan memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.⁶²

Nepal menempati peringkat terburuk dibandingkan dengan negara-negara lain dalam hal perlindungan sosial termasuk pengeluaran, cakupan, target kemiskinan dan dampaknya. Demikian pula, indeks yang dikembangkan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) pada tahun 2007 di mana peringkat sistem perlindungan sosial Nepal pada 0.19 skala 0 hingga 1. Meskipun pendekatan universal dari skema tersebut bervariasi, tingkat cakupan untuk kelompok kunci perlindungan sosial seperti 30 persen untuk lansia, maupun di bawah 10 persen untuk orang cacat atau orang-orang yang berhak mendapat asuransi kesehatan. Laporan ADB menjelaskan bahwa hanya 2,3 juta orang menerima bentuk transfer perlindungan sosial yang meliputi kurang dari 10 persen populasi di Nepal. Oleh sebab itu, inisiatif perlindungan sosial pemerintah Nepal yang telah dirintis dianggap masih kurang efektif dari yang diharapkan.⁶³

Perlindungan sosial di Nepal tersebut dapat ditelusuri dalam komponen kebijakan sosial di Nepal tahun 2008 dan beberapa di antaranya telah ada di Nepal sejak periode sebelum konflik (*People's war*). Misalnya *Karnali Employment Programme* (KEP) yang merupakan program khusus di daerah paling terpencil dan kurang beruntung di Nepal, yaitu Zona Karnali (terdiri dari Distrik Dolpa, Humla, Jumla, Kalikot and Mugu) dengan menawarkan program '*one family one job*' atau 'satu keluarga satu pekerjaan'. Tujuan program

⁶⁰ Andy Norton, Tim Conway dan Mick Foster, *Social Protection Concepts and Approaches: Implications for Policy and Practice in International Development. Working Paper 143*, Centre for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute, UK, February (p. 21-22). 2001.

⁶¹ Armando Barrientos, *Social Protection and Poverty, Social Policy and Development Programme Paper No. 42*, United Nations Research Institute for Social Development, January. 2010.

⁶² D.R. Khanal, *Op.Cit*, 12.

⁶³ *Ibid*, 39.

tersebut adalah memberikan perlindungan sosial melalui pekerjaan jangka pendek dan menciptakan aset sosial dan ekonomi di daerah terpencil tersebut.⁶⁴

Skema ini sebenarnya diadopsi sebagai kebijakan di Nepal dengan mencontoh Undang-Undang Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional Mahatma Gandhi di India (*Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act of India*). Di India, program ini menyediakan 100 hari kerja dengan bayaran 180 rupee hingga 350 rupee per hari pada program infrastruktur pemerintah untuk orang yang bersedia melakukan pekerjaan manual yang tidak terampil, dengan upah tetap di tingkat distrik. Mirip dengan pendekatan India, di Nepal program tersebut menjamin transfer sosial jika pekerjaan pada skema pekerjaan umum tidak tersedia. Dalam KEP ini terdapat komitmen tidak adanya diskriminasi dengan memasukkan semua kasta untuk dapat terlibat. Selain KEP, Nepal juga menyediakan perlindungan sosial dalam bentuk *block grant* di tingkat distrik yang diperkenalkan pada akhir 2007 di 20 distrik dan kemudian ditingkatkan ke 75 distrik lainnya untuk mendanai pembangunan infrastruktur, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan jumlah populasi, luas distrik, HDI, indeks biaya hidup, dan tingkat pendapatan. Pada dasarnya, KEP dan *block grant* dapat menjadi elemen dalam perlindungan sosial yang dapat berkontribusi pada perubahan struktural, asalkan pilihan skema infrastruktur dan lokasi tertentu diputuskan secara demokratis, mengatasi permasalahan pengucilan sosial dan ketidaksetaraan lokasi, dan menaikkan batas minimum upah lokal.⁶⁵

Kesimpulan

Perang Sipil di Nepal terjadi karena permasalahan ekonomi yang dialami warga

dan adanya penolakan politik dari oposisi pemerintah atas tuntutan yang diajukan. Setelah berakhirnya Perang Sipil di Nepal melalui kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada tahun 2006 menjanjikan adanya perubahan ekonomi dan sosial di negara tersebut.

Upaya pencapaian keamanan ekonomi pasca berakhirnya perang sipil di Nepal tidak mampu dicapai mengingat tingginya angka korupsi dan ketidakmampuan pemerintah Nepal dalam supremasi hukum. Munculnya kartel partai yang melahirkan sindikat rezim politik dan ekonomi yang berkuasa dan mengontrol kebijakan politik, ekonomi dan sosial secara oportunistik telah mengakibatkan meningkatnya kemiskinan moneter dan non-moneter dan taraf hidup masyarakat yang kurang layak.

Selain itu, penerapan rezim ekonomi neoliberal di Nepal juga ikut menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kemiskinan moneter dan non-moneter sehingga menimbulkan ketidakamanan ekonomi di negara tersebut. Dari segi penerapan rezim politik, terlihat bahwa kapabilitas pemerintah Nepal dalam menyediakan perlindungan sosial pasca berakhirnya Perang Sipil bagi masyarakat masih tergolong buruk termasuk dalam hal pengeluaran anggaran, jenis perlindungan sosial yang diberikan, target kemiskinan maupun dampak dari kebijakan tersebut.

Referensi

- Ahsan, M. K. (2018). Revisiting The Concept of Human Security. *Philosophy and Progress*, 59(1-2), 9-42. <https://doi.org/10.3329/pp.v59i1-2.36679>
- Alkire, Sabina. (2003). A conceptual framework for human security. *Working Paper 2*. Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE).

⁶⁴ Gabriele Koehler, Social Protection and Socioeconomic Security in Nepal, *IDS WORKING PAPER*, Volume 2011 Number 370 (p. 12). 2011.

⁶⁵ *Ibid*.

- Barrientos, Armando. (2010). Social Protection and Poverty. *Social Policy and Development Programme Paper No. 42*, United Nations Research Institute for Social Development, January.
- Basnett, Yurendra. (2009). From Politicization of Grievances to Political Violence: An Analysis of the Maoist Movement in Nepal. *Working Paper Series*, London School of Economy, March (pp.1-33).
- Bernholz, Peter. (1998). Causes of Change in Political-Economic Regimes. In Borner, Silvio dan Paldam, Martin (Ed.), *The Political Dimension of Economic Growth* (pp. 74-94). Proceedings of the IEA Conference held in San Jose, Costa Rica. London: Palgrave Macmillan.
- Branco, M.C. (2015). Can Markets Secure Economic and Social Human Rights?. *International Critical Thought*, 5:1 (pp. 80-94).
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*, 4th Edition. London, UK: Sage Publications.
- Chotimah, Hidayat Chusnul, et al. (2017). Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security. *Transformasi Global* 4, 1 (pp. 65-66).
- Dahal, Dev Raj. (2011). Shaping tomorrow's economy: Challenges and Choices for Nepal. Paper Presented at a *High-Level Seminar organized by FES and GEFONT on July 10-11, Kathmandu, Nepal*, 2011.
- Dhungel, Kamal Raj. (2015). Contribution of Foreign Aid in Nepal's Economy. Retrieved from <http://www.newbusinessage.com/MagazineArticles/view/1137>.
- Ewan, Pauline. (2007). Deepening the Human Security Debate: Beyond the Politics of Conceptual Clarification. *Politics*, Vol 27 No. 3 (pp. 182-189).
- Ewan, Pauline. (2010). The Human Security Agenda in World Politics. Dalam Bilgin, P. et al, *Global Security and International Political Economy - Vol. I* (pp. 133-157). United Kingdom: Eolss Publishers/ UNESCO.
- Hatlebakk, Magnus. (2017). *Nepal: A Political Economy Analysis*. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs.
- Imam, P., & Salinas, G. (2008). Explaining episodes of growth accelerations, decelerations, and collapses in Western Africa. *IMF Working Paper*, 08/287.
- Joshi, N. P., Maharjan, K. L., dan Piya, Luni. (2010). Poverty and food insecurity in Nepal: A review. *Journal of International Development and Cooperation*, Vol. 16, No.2 (pp. 1-19).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Retrieved from <https://kbbi.web.id/sindikata>
- Karkee, Madhab. (2008). Nepal economic growth assessment agriculture. (2008, August 12). Nepal, Kathmandu: USAID.
- Karki, Arjun dan David Seddon. (2003). Chapter 1 People in Historical Context. Dalam *The People's War in Nepal Left Perspectives*, Karki, Arjun dan David Seddon (ed.). Delhi: Adroit Publishers.
- Khanal, D. R. (2013). *Social security/Social protection in Nepal: Situation analysis*. Nepal: ILO.
- Khatriwada, Padma Prasad. (2014). The Nepalese Peace Process: Faster Changes, Slower Progress. *Inclusive Political Settlements Paper 9*. Berlin: Berghof Foundation.
- Khatriwada, Yuba Raj. (2014). Cooperatives, economic democracy and human

- security: Perspectives from Nepal. Paper presented at *1st National Cooperative Congress, March 27, 2014, Kathmandu, Nepal*. Retrieved from: https://www.nrb.org.np/ofg/events_ofg/Governor's_Speeches--Governor's_Presentation_Paper_at_1st_National_Cooperative_Congress_a.pdf.
- Koehler, Gabriele. (2011). Social Protection and Socioeconomic Security in Nepal. *IDS WORKING PAPER*, Volume 2011 Number 370.
- Mage, John. (2007). The Nepali Revolution and Internasional Relations. *Economic and Political Weekly*, May 19.
- Mathew, Richard A dan Bishnu Raj Upreti. (2010). Environmental change and human security in Nepal. Dalam *Global environmental change and human security*, Mathew, Richard A., dkk. (Eds.), 137-154. Cambridge: MIT Press.
- Mishra, Birendra. (2009). Strength and weaknesses of the Nepalese peace process. Paper submitted to Seminar on “Building Bridges for Peace in Nepal” pada 6-7 Oktober 2009.
- Nelson, Andrew. (2017). Betrayed by the Neoliberal State, Neglected by the “Jangali” Company: The Anxiety of Autonomy in an Elite Housing Colony in Kathmandu, Nepal. *City & Society*, Vol. 29, Issue 1 (pp. 35-58).
- Nepali, Bharat. (2015). Negotiating access to land and tenure security for economic growth in Nepal. Paper Prepared for Presentation at *the “2015 World Bank Conference on Land and Poverty” The World Bank - Washington DC, March 23-27*.
- Newman, Edward. (2001). Human Security and Constructivism. *International Studies Perspectives*, 2 (pp. 239-251).
- Norton, Andy, Tim Conway dan Mick Foster. (2001). Social Protection Concepts and Approaches: Implications for Policy and Practice in International Development. *Working Paper 143*, Centre for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute, UK, February.
- Owen, Taylor. (2008). *The Uncertain future of human security in the UN*. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
- Przeworski, A., Alvarez, M., Cheibub, J. A., & Limongi, F. (2000). *Democracy and development: Political regimes and economic well-being in the world 1950–1990*. New York: Cambridge University Press.
- Sen, Armartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Shrestha, Prakash Kumar. (2010). Structural Changes and Economic Growth in Nepal (October 19) . Retrieved From https://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/conference_papers/newschool/prakash.pdf.
- Singh, Prashant Kumar. (2016). Changing Contexts of Chinese Military Strategy and Doctrine. *IDS Monograph Series* No. 49 March 2016. New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses.
- Snape, D dan Spencer, L. (2003). The Foundation of Qualitative Research. Dalam Ritchie, Jane dan Lewis, Jane (Ed.), *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Student and Researchers* (pp.1-23). London, UK: Sage Publication.
- Subedi, D.B. (2012). Economic dimension of peacebuilding: Insight into Post-conflict Economic Recovery and Development in Nepal. *South Asia Economic Journal*, 13, 2.

- Sunam, Ramesh dan Keshab Goutam. (2013). The rise of Maoists in Nepali politics: from 'people's war' to democratic politics. *East Asia Forum* (Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific). Retrieved from <http://www.eastasiaforum.org>.
- Tzifakis, Nikolaos. (2011). Problematizing human security: a general/contextual conceptual approach. *Southeast European and Black Sea Studies*, Vol 11 No 4 (pp. 353-368).
- United Nation Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.
- Upreti BR, Bhattarai R, Wagle GS. (2013). *Human Security in Nepal: Concepts, Issues and Challenges*. Kathmandu: Nepal Institute for Policy Studies (NIPS) and South Asia Regional Coordination Office of NCCR (North-South).
- Verma, A.S dan Navlakha, Gautam. (2007). People's War in Nepal: Genesis and Development. *Economic and Political Weekly*, May 19.
- Winters, L. A. (2004). Trade liberalisation and economic performance: An overview. *The Economic Journal*, 114 (493).